

Kelompok 7

1. Gaka Awangga 2211011011
2. Deshinta Rachman 2211011052
3. Amira Munira 2211011077
4. Elsa Dea Damayanti 2211011086
5. Resty Putri Ulyanah 2211011122

CASE/PROBLEM BASED TEMPLATE

IDENTITAS MATAKULIAH			
Mata pelajaran:	Komunikasi Bisnis		
Pokok Bahasan:	Komunikasi Lintas Budaya		
Sub Pokok Bahasan:			
CPMK			
Sub CPMK			
Kasus/Problem:	Momen DPR Tegur Direktur Perusahaan China Karena Tak Pakai Bahasa Indonesia di Sidang		

SCRIPT – INTRODUCTION/ORIENTASI PADA MASALAH

Orientasi pada masalah/Defining the Problem (Open ended problem/Real life Problem)

KASUS/PROBLEM	Kasus yang dibahas adalah momen di DPR RI di mana pimpinan Komisi VII menegur petinggi perusahaan smelter asal China karena tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam sidang. Kejadian ini terjadi saat rapat dengar pendapat (RDP) yang dihadiri oleh Plt Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan 20 pimpinan perusahaan smelter nikel yang sudah beroperasi untuk membahas tata kelola niaga nikel Pada saat rapat berlangsung, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, meminta para bos perusahaan smelter		
---------------	---	--	--

	untuk memperkenalkan diri mereka. Namun, beberapa dari pimpinan tersebut memperkenalkan diri menggunakan bahasa Mandarin dan Inggris. Eddy pun menegur bahwa dalam rapat di DPR seharusnya menggunakan bahasa Indonesia. Beberapa bos perusahaan smelter nikel asal China yang tidak bisa berbahasa Indonesia memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris dan Mandarin. Eddy menegaskan bahwa ini adalah sidang parlemen resmi dan semua sidang parlemen dilakukan dalam bahasa Indonesia. Ia juga menekankan bahwa aturan tersebut menyatakan bahwa peserta sidang parlemen harus diwakili oleh seseorang yang dapat berbicara dalam bahasa Indonesia. Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa ada empat direktur perusahaan smelter nikel yang mangkir, yaitu PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, PT Dexin Steel Indonesia, PT Weda Bay Nickel, dan PT Virtue Dragon Nickel Industry. Mangkirnya direktur-direktur ini dianggap sebagai tindakan yang melecehkan.		
SCRIPT – ANALISIS MASALAH			
1. Tiap kelompok Brainstorming			
•Kelompok 1 Putri Chantika Khairunnisa (2211011086) Kasus tersebut menunjukkan ketidaksesuaian penggunaan bahasa dalam sidang parlemen, khususnya oleh perusahaan smelter asal China di DPR RI. Solusi yang dianjurkan adalah memberikan pemahaman lebih lanjut tentang kebijakan bahasa resmi DPR kepada perusahaan asal China, mungkin melalui pelatihan atau panduan tertulis. Selain itu, dapat diadakan pertemuan bilateral untuk memperkuat pemahaman dan kerjasama antara DPR RI dan perusahaan-perusahaan tersebut dalam menghormati kebijakan bahasa resmi Indonesia. • Kelompok 2 Echa Reza Ananda (2211011031)			

Kejadian di DPR RI menyoroti pentingnya penggunaan bahasa resmi dalam komunikasi bisnis di Indonesia. Untuk menyelesaikan ini, perusahaan-perusahaan asing perlu memastikan perwakilannya mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dalam sidang parlemen. Pelanggaran aturan tersebut sebaiknya dihindari agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau konflik lebih lanjut. Pelatihan bahasa Indonesia bagi perwakilan perusahaan bisa menjadi solusi jangka panjang untuk menghindari kejadian serupa di masa depan.

- Kelompok 3

Dinda Setiawati (2211011080)

Kasus ini menunjukkan pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya. Dalam konteks ini, penyelesaian yang singkat dan jelas adalah dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan berbahasa Indonesia bagi para pimpinan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan bahasa Indonesia dan kesadaran akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks rapat resmi di Indonesia. Selain itu, pihak terkait juga perlu memastikan bahwa aturan terkait penggunaan bahasa dalam rapat resmi diikuti dengan baik oleh semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, kesalahpahaman dan konflik terkait penggunaan bahasa dalam konteks bisnis dapat diminimalkan, sehingga hubungan bisnis lintas budaya dapat terjaga dengan baik.

- Kelompok 4

Genta Arazi (2251011005)

Dalam momen rapat di DPR RI, terjadi ketidaksesuaian komunikasi saat pimpinan Komisi VII menegur petinggi perusahaan smelter asal China yang menggunakan bahasa Mandarin dan Inggris dalam sidang. Wakil Ketua Komisi VII, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa sidang parlemen di Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia, dan aturan tersebut menuntut agar peserta dapat berbicara dalam bahasa resmi tersebut. Mangkirnya empat direktur perusahaan smelter nikel asal China dari PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, PT Dexin Steel Indonesia, PT Weda Bay Nickel, dan PT Virtue Dragon Nickel Industry dianggap sebagai tindakan melecehkan, menciptakan ketidakpahaman dan ketegangan dalam konteks komunikasi bisnis. Untuk menyelesaikan situasi ini, langkah-langkah yang dapat diambil melibatkan klarifikasi aturan komunikasi, penegakan aturan, dan pendidikan bahasa Indonesia. Pimpinan Komisi VII dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang aturan komunikasi di sidang parlemen, dengan penekanan khusus pada penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Selanjutnya, perlu dilakukan penegakan aturan yang konsisten dengan memberikan peringatan resmi dan, jika perlu, menerapkan sanksi kepada peserta yang melanggar aturan tersebut. Selain itu, tawarkan opsi pendidikan bahasa Indonesia kepada peserta yang kesulitan berkomunikasi dalam bahasa tersebut, agar dapat meningkatkan partisipasi yang efektif dalam sidang parlemen. Melalui dialog terbuka antara DPR dan perusahaan, solusi yang saling menguntungkan dapat dicapai, menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih harmonis dan efektif.

- Kelompok 5

Devina Qori Denila (2111011117)

Dalam kasus ini, terjadi ketidaksesuaian dalam komunikasi bisnis antara pimpinan Komisi VII DPR RI dan petinggi perusahaan smelter asal China. Saat beberapa bos perusahaan smelter memperkenalkan diri menggunakan bahasa Mandarin dan Inggris, Wakil Ketua Komisi VII, Eddy Soeparno, menegur mereka karena seharusnya sidang di DPR menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini menciptakan ketegangan dalam komunikasi, mengingat aturan yang mengharuskan peserta sidang parlemen dapat berbicara dalam bahasa Indonesia. Mangkirnya empat direktur perusahaan smelter nikel, yang dianggap sebagai tindakan melecehkan, semakin menambah kompleksitas situasi. Untuk menyelesaikan kasus ini, perlu dilakukan klarifikasi aturan komunikasi secara tegas dan penegakan aturan yang konsisten. Pimpinan Komisi VII perlu memberikan penjelasan rinci tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam sidang parlemen. Penegakan aturan perlu dilakukan dengan memberikan peringatan resmi dan sanksi jika aturan tersebut dilanggar. Seiring itu, mengundang empat direktur perusahaan yang mangkir untuk berpartisipasi dalam sidang berikutnya dan menjelaskan tindakan mereka dapat membantu mengatasi ketegangan dan mencapai pemahaman yang lebih baik. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan komunikasi yang lebih efektif dan penuh rasa hormat antara DPR dan perusahaan smelter.

- Kelompok 6

Rangga Destri Saputra (2211011155)

Kasus ini menunjukkan pentingnya komunikasi bisnis yang efektif, terutama dalam konteks lintas budaya. Penggunaan bahasa yang tepat sesuai dengan konteks merupakan aspek kunci dalam berbisnis di lingkungan internasional. Dalam hal ini, para pimpinan perusahaan smelter asal China seharusnya memastikan bahwa mereka memiliki perwakilan yang mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia saat menghadiri rapat di DPR RI. Penyelesaian yang tepat untuk kasus ini adalah dengan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia memiliki perwakilan yang mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui perekrutan staf lokal yang mampu berbahasa Indonesia atau melalui penerjemah resmi. Selain itu, perusahaan juga sebaiknya memberikan pelatihan bahasa Indonesia kepada staf-stafnya agar dapat berkomunikasi dengan lebih efektif di lingkungan bisnis Indonesia. Dengan demikian, kesalahpahaman seperti yang terjadi dalam kasus ini dapat dihindari di masa depan.

- Kelompok 8

Romualdus Domu Sinaga (2211011146)

Kasus ini menyoroti pentingnya penggunaan bahasa resmi dalam konteks rapat di lembaga pemerintahan seperti DPR. Penyelesaiannya bisa melalui pengingat kepada peserta rapat akan kebijakan penggunaan bahasa resmi, memberikan keterlibatan dan kesiapan lebih lanjut dalam memahami aturan tersebut sebelum rapat, serta mengadakan koordinasi sebelumnya untuk memastikan semua pihak memahami dan mematuhi kebijakan tersebut. Juga, jika memungkinkan, menyediakan penerjemah atau fasilitas untuk memastikan semua pihak dapat berkomunikasi dengan baik tanpa mengurangi pentingnya bahasa resmi.

2. Alternatif Solusi

Alternatif solusi dari kasus ini adalah memberikan pelatihan bahasa Indonesia kepada para pimpinan perusahaan smelter nikel asal China yang hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPR RI. Hal ini dapat membantu para pimpinan perusahaan untuk lebih memahami aturan dan tata cara dalam sidang parlemen resmi di Indonesia. Selain itu, pihak DPR RI juga dapat menyediakan penerjemah bahasa untuk membantu para pimpinan perusahaan yang tidak bisa berbahasa Indonesia dalam mengikuti rapat dengar pendapat. Dengan demikian, diharapkan kejadian seperti ini tidak terulang kembali di masa depan dan dapat meningkatkan efektivitas rapat dengar pendapat di DPR RI.		
---	--	--

SCRIPT-PROBLEM SOLVING ACTIVITES

3. Mengumpulkan informasi dan Pengembangan Solusi

Pada tanggal 8 Juni 2023, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, menegur beberapa pimpinan perusahaan smelter nikel asal China karena tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPR RI. Hal ini bertentangan dengan aturan yang menyatakan bahwa peserta sidang parlemen harus diwakili oleh seseorang yang dapat berbicara dalam bahasa Indonesia. Beberapa bos perusahaan smelter nikel asal China yang tidak bisa berbahasa Indonesia memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris dan Mandarin. Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa ada empat direktur perusahaan smelter nikel yang mangkir, yaitu PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, PT Dexin Steel Indonesia, PT Weda Bay Nickel, dan PT Virtue Dragon Nickel Industry. Mangkirnya direktur-direktur ini dianggap sebagai tindakan yang melecehkan.

Pengembangan solusi yang tepat melibatkan kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan smelter nikel asal China. Selain pelatihan bahasa, dapat dilakukan pertemuan rutin antara perusahaan dan anggota DPR RI untuk memperjelas prosedur dan harapan dari kedua belah pihak. Selain itu, pembentukan forum dialog lintas budaya dapat memfasilitasi pemahaman saling mengenai norma dan nilai di setiap negara. Langkah-langkah ini dapat membentuk kerjasama yang lebih efektif dan saling menghormati antara Indonesia dan perusahaan asing, mengurangi potensi kesalahpahaman di masa depan.

4. Presentasi (Sharing) dan Penyajian Hasil Karya

https://drive.google.com/file/d/1frWd_OC9bUBNvavQTkFUSFaqkq_5e6gX/view?usp=drivesdk

SCRIPT-REFLEKSI DAN TINDAK LANJUT

- 1) Setelah insiden ini, Komisi VII DPR RI seharusnya mengambil tindakan konkret untuk memastikan agar aturan penggunaan bahasa Indonesia dalam sidang dihormati oleh semua peserta.
- 2) Komisi VII DPR RI dapat mengundang perusahaan-perusahaan smelter asal China, termasuk PT Obsidian Stainless Steel, untuk menjalani prosedur formal dalam memilih seorang perwakilan yang dapat berbicara dalam bahasa Indonesia pada rapat-rapat selanjutnya.
- 3) Pihak DPR RI juga dapat menyusun panduan dan prosedur yang lebih jelas terkait penggunaan bahasa Indonesia dalam sidang parlemen. Ini termasuk tindakan yang harus diambil jika peserta sidang tidak mematuhi aturan tersebut.

4) DPR RI sebaiknya menjalin kerja sama dengan lembaga penerjemah profesional untuk memfasilitasi komunikasi dalam bahasa Indonesia bagi peserta yang tidak menguasainya. Refleksi: Kejadian ini menggambarkan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia dalam sidang parlemen sebagai salah satu elemen penting dalam menjaga kedaulatan bahasa dan budaya nasional. Namun, juga perlu dipahami bahwa dalam situasi di mana perusahaan internasional terlibat, komunikasi yang efektif mungkin memerlukan penerjemah yang kompeten. DPR RI telah menegur perusahaan-perusahaan asal China yang tidak mematuhi aturan bahasa Indonesia dalam sidang, menunjukkan komitmen mereka terhadap bahasa nasional. Namun, dalam situasi semacam ini, penting bagi DPR RI untuk menawarkan solusi konkret, seperti menyediakan penerjemah atau mengundang perwakilan yang dapat berbicara dalam bahasa Indonesia. Selain itu, kesempatan ini juga digunakan oleh DPR RI untuk menegur perusahaan smelter nikel yang tidak hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut, yang menunjukkan keprihatinan mereka terhadap ketidakpatuhan dalam proses legislasi. Momentum ini bisa menjadi titik awal untuk perbaikan dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam sidang parlemen dan memastikan bahwa perusahaan asing yang terlibat dalam proses legislasi mematuhi aturan yang berlaku.		
Validate Date: Rabu, 27 September 2023 Lecturer: (1) Risda Marvinita SE,M.Si (2) Dr. Nova Mardiana, S.E,M.M		